

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat. Secara substansial, proses pendidikan haruslah menciptakan manusia-manusia terdidik yang dapat mengenal dirinya, mengenal lingkungan sekitar, dan mengenal penciptanya. Dalam mengoperasikan pendidikan secara substansial, maka diperlukan seperangkat instrumen pendidikan yang matang dan mapan. Akan tetapi, proses operasional pendidikan tersebut sering terjatuh kepada agenda-agenda formalitas semata. Akhirnya, pendidikan yang diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang bermartabat itu hanyalah sebuah ilusi dan imajinasi saja.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas telah mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut bukanlah agenda sempit yang dapat diciptakan jika proses pendidikan hanya berjalan secara formalitas dan stagnan. Artinya, tugas pendidikan adalah tugas besar yang memiliki dimensi perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Hal ini, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 3 pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,..(Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Senada dengan itu, mengutip Nelson Mandela dalam buku *Pendidikan yang Berkebudayaan* (Yudi Latif, 2020) mengatakan, “*pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia.*” Proses mencerdaskan kehidupan bangsa secara kongkrit telah meletakkan peran strategis pendidikan sebagai jalan untuk menempuh peradaban yang gemilang. Peran strategis pendidikan dalam hal ini adalah mengupayakan lahirnya manusia-manusia yang memiliki daya pengubah. Manusia pengubah yang berkarakter, kreatif, dan inovatif.

Namun, cita-cita mulia pendidikan yang dibayangkan berbentur dengan realia yang kita temui. Jauh panggang dari pada api, cita-cita itu tidak berimbang dengan proses pendidikan yang dijalankan. Pendidikan, belum mampu menjawab semua angan

tentang cita-cita itu karena adanya beberapa permasalahan. Setidaknya, ada tiga permasalahan umum dalam pendidikan di Indonesia yang bisa kita kategorikan dalam tiga skala, yaitu makro, meso, dan mikro.

Pada skala makro, masalah pendidikan adalah liberalisasi pendidikan. Sejak 1995, Indonesia tergabung dalam WTO dan meratifikasi perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No. 7 tahun 1994. Pada 2005, sebagai anggota WTO, Indonesia menandatangani *General Agreement on Trade in Service (GATS)* yang mengatur liberalisasi perdagangan dalam 12 sektor jasa, termasuk pendidikan tinggi dan pendidikan sepanjang hayat. Dalam tipologi ekonomi, kegiatan usaha dibagi menjadi tiga sektor: 1) Primer, mencakup industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian; 2) Sekunder, mencakup industri pengolahan bahan dasar menjadi barang, manufaktur, dan utilitas; dan 3) Tersier, mencakup industri untuk mengubah wujud benda fisik, keadaan manusia, dan benda simbolik. Pendidikan termasuk ke dalam industri sektor tersier karena bertujuan mengubah keadaan manusia dari yang tidak berpengetahuan menjadi berpengetahuan (Effendi, 2007).

Hal ini tentu akan baik jika orientasinya adalah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Sesuai dengan cita-cita liberalisasi, yaitu pembebasan. Namun disisi lain, liberalisasi pendidikan tidak tepat jika dibarengi dengan arogansi untuk melakukan ekspansi ekonomi. Apalagi dengan logika tersier yang ditetapkan. Bahkan, sejumlah pihak mengkhawatirkan peningkatan mutu yang dimaksud adalah yang berkualitas sebagai mana yang dianut oleh para ekonom liberal; yang jelas jelas menguntungkan pemodal, bukan rakyat (M. Nur, 2009).

Bercampur aduknya bahasa ekonomi dan politik dalam dunia pendidikan berdampak kepada tidak merata dan mahalnya akses masyarakat untuk menikmati pendidikan. Apalagi terhadap masyarakat kelas bawah yang tidak mempunyai modal budaya yang cukup. Pada pertengahan 2022, Kompas secara mengejutkan mengeluarkan laporan yang mengombinasikan data upah orang tua lulusan SMA dan universitas dari Badan Pusat Statistik sejak tahun 1995 sampai 2022 dengan data biaya studi dari 30 perguruan tinggi negeri dan swasta sejak tahun 2013 sampai 2022. Berangkat dari laporan tersebut, diambil sebuah kesimpulan bahwa adanya ketimpangan pendapatan orang tua dengan tingginya biaya pendidikan di Indonesia, bahkan ketika orang tua telah menyiapkan tabunan untuk biaya pendidikan sejak dini

(Rosalina et al., 2022). Pada tahap ini, pendidikan telah menjadi barang mahal yang hanya dapat diakses dan dinikmati oleh kelas atas ataupun pemodal. Ketika liberalisasi pendidikan mengalami disorientasi dan miskonsepsi, maka disanalah kebebasan mendapatkan pendidikan dan keleluasaan mengelola pendidikan menjadi tujuan yang semu.

Adapun dalam skala meso, masalah pendidikan adalah labilnya kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait perubahan kurikulum. Kelabilan itu bisa dilihat dari gampangnya kurikulum di Indonesia berubah. Sejak Indonesia merdeka, terhitung sudah 10 sampai 11 kali perubahan kurikulum (Nurhuda, 2022). Perubahan kurikulum memang bukan kebijakan yang salah sepenuhnya, jika perubahan itu memiliki visi keberlanjutan jangka panjang dan linier. Akan tetapi, perubahan kurikulum di Indonesia hanya sebatas respon-respon terhadap kondisi yang bersifat insidental dan pengaruh politik yang bersifat periodikal (Wijarwadi & Alam, 2023).

Tidak adanya visi berkelanjutan jangka panjang dan linieritas dalam pendidikan inilah yang membuat perubahan kurikulum menjadi masalah. Sebab, jika pendidikan menghendaki perubahan martabat hidup ke arah yang lebih baik, maka diperlukan strategi dan ketekunan dalam menjalankan proses pendidikan secara konsisten dan inheren. Bukan secara labil mengambil keputusan untuk mengubah kurikulum yang akan menyebabkan terjadi juga perubahan-perubahan dalam perangkat di bawahnya. Persoalan perubahan kurikulum, menjadi semakin kompleks setelah pemerintah menetapkan kebijakan desentralisasi pendidikan pada tahun 2004.

Kendatipun kebijakan desentralisasi pendidikan adalah upaya untuk mengakomodasi dan melibatkan partisipasi masyarakat secara instan dalam pendidikan. Kebijakan itu juga menimbulkan masalahnya yang baru, mulai dari minimnya kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mengelola pendidikan ataupun menyerap instruksi pemerintah pusat, pemerintah pusat yang dianggap lepas tangan, dan kegagalan pemerintah daerah untuk menangkap inovasi dalam dunia pendidikan itu sendiri (Maisyanah, 2018). Maka, dari sini kita bisa melihat bagaimana tantangan alur kebijakan perubahan kurikulum itu agar dapat terealisasikan sampai tingkat daerah dengan baik.

Sedangkan, pada tahun 2018, ada survey melalui telepon yang merupakan bagian dari *Research on Improving Systems of Education (RISE) Programme* untuk

mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah ataupun pusat mengenai pendidikan. Survey yang dilakukan terhadap 26 kabupaten dan kota itu menunjukkan bahwa banyak kebijakan di daerah yang tidak efektif, dalam artian tidak sesuai kebutuhan dan sasaran. Hasil temuan lainnya, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah juga ditentukan dari anggaran yang dimiliki oleh daerah setempat. Hal ini berkaitan dengan kebijakan yang banyak mengeluarkan anggaran, seperti bonus gaji, infrastruktur, dan fasilitas (Zulfa et al., 2019). Kondisi pendidikan di tingkat daerah dengan sekelumit persoalan kebijakannya ini, secara tidak langsung menjadi persoalan yang harus dijawab sebelum melakukan perubahan kurikulum. Dalam skala meso ini, pemerintah harus dapat menformulasikan kebijakan secara matang, terencana, terukur, terorganisir, dan bisa dievaluasi secara efektif nantinya.

Terakhir dalam skala mikro pendidikan di Indonesia berhadapan dengan problematika yang kompleks. *Pertama*, masalah pengadaan sarana dan prasarana. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menciptakan kualitas pendidikan harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Akan tetapi, kendala yang paling jamak ditemukan dalam proses pengadaan sarana dan prasarana adalah minimnya biaya. Padahal, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan anggaran besar untuk pendidikan. Akar permasalahan dalam menyediakan sarana dan prasarana ini tidak bisa dilepaskan dari ketidakefektifan proses pendistribusian anggaran pendidikan. Selain itu, pengelolaan anggaran yang boros dan tidak merata, antara daerah perdesaan ataupun perkotaan juga menjadi masalah dalam pengadaan sarana dan prasarana yang layak dalam pendidikan (Amelia, 2019).

Kedua, kompetensi dan kapabilitas tenaga pendidik. Sebagai upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, maka dibutuhkan sosok guru yang profesional. Guru yang mempunyai kompetensi untuk menangkap dan memahami potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar dapat memberdayakan fitrah manusianya (Fitri, 2021). Akan tetapi, tuntutan kompetensi guru yang banyak itu tidak berimbang dengan peningkatan kualitas hidup mereka. Berbicara tentang peningkatan kualitas hidup, maka kita akan berbicara tentang kapabilitas. Amartya Sen dalam *Pendidikan yang Berkebudayaan* (Yudi Latif, 2020) mendefinisikan kapabilitas dengan:

Kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan bernilai (valuable acts) atau meraih keadaan yang bernilai (valuable state of being); hal itu

merepresentasikan kombinasi dari beberapa hal alternatif yang membuat seseorang bisa melakukan atau menjadi sesuatu.

Terkadang, guru sulit untuk mencapai tindakan atau keadaan yang bernilai ketika ia disibukkan dengan persoalan-persoalan administratif pendidikan yang sulit. Apalagi, profesi guru yang tidak menjanjikan untuk keberlangsungan hidup menuntut guru untuk membagi fokus kepada hal lain. Sehingga, intensitas guru untuk menciptakan tindakan atau kondisi yang bernilai sebagai tenaga pendidik semakin jauh dari harapan. Najelaa Shihab (2020) mengungkapkan, satu-satunya hal yang membuat guru bertahan adalah kesetiaan untuk melahirkan manusia-manusia terdidik, seperti mendidik anak sendiri.

Beberapa masalah pendidikan yang telah dipaparkan ini memberi dampak timbulnya jurang pemisah antara pendidikan dan kehidupan. Pendidikan tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat dan memperlambat terjadinya proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Meskipun pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan *link and match* sejak zaman Orde Baru untuk memecahkan permasalahan ini. Tapi, jurang pemisah itu masih ada hari ini. Bahkan, konsepsi *link and match* dimaknai secara sempit dengan membangun pedagogi pendidikan yang berwatak teknikal-vokasional baru guna menjawab ketersediaan tenaga kerja (Malik, 2022). Hal ini telah mereduksi visi pendidikan sebagai *the royal road* (jalan emas) menuju perubahan sosial. Sebab, pekerjaan hanya menjadi bagian kecil dari visi pendidikan.

Mengatasi persoalan kompleks ini, dibutuhkan pedagogi pendidikan yang dapat melampaui agenda - agenda jangka pendek dengan suatu pedagogi pendidikan yang mengakar dan berdampak luas. Paulo Freire telah mengenalkan visi pendidikan yang berorientasi perubahan sosial dengan pendidikan dialogisnya. Henry Giroux juga telah menekankan bagaimana pentingnya pedagogi kritis untuk menciptakan pendidikan yang demokratis ditengah arus neo-globalisasi (Fitramadhana, 2022). Bahkan, Tan Malaka (1943) dalam karyanya yang monumental telah meletakkan pentingnya berfikir logis untuk mencapai perubahan sosial, dalam konteks itu adalah kemerdekaan. Pada titik inilah, pendidikan intelektual menjadi jawaban untuk membentuk ekosistem pedagogi pendidikan yang dialogis, kritis, dan logis dalam proses pembelajaran. Subekti dalam jurnal *Standar Intelektual: Solusi untuk Masalah Pendidikan* (Ika et al., 2023) mengutarakan solusi untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia adalah dengan memperbaiki pedagoginya.

Berangkat dari permasalahan ini, peneliti bermaksud untuk meneliti pendidikan intelektual yang dijalankan di PK IMM FAI UMY melalui agenda kaderisasi dan gerakan sosialnya. PK IMM FAI UMY sebagai salah satu organisasi gerakan mahasiswa Islam di Indonesia yang memiliki fokus dan konsentrasi dalam ranah kaderisasi intelektual mempunyai spirit amal ilmiah dan ilmu amaliah. Melalui spirit itu, PK IMM FAI UMY memilih jalan untuk melaksanakan pendidikan intelektual dengan basis *creative minority*, salah satunya dengan mengadakan Sekolah Pemikiran Islam. Penelitian dengan judul “Pendidikan Intelektual Berbasis *Creative Minority* di Sekolah Pemikiran Islam PK IMM FAI UMY” ini diharapkan mampu untuk melihat sejauh mana sejarah, dinamika, dan efektifitas pendidikan intelektual yang telah dijalankan. Kemudian, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi *banchmarking* untuk menciptakan pedagogi pendidikan yang lebih berdampak kepada kehidupan nantinya.

Salah satu lembaga pendidikan formal yang memakai konsep *creative minority* dalam pedagoginya adalah Universitas Kristen Satya Wacana. Hal ini didasari dari pidato Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Oeripan Notohamidjojo pada saat Dies Natalisnya yang ke – XV tentang pembangunan nasional.

“Pembentukan kelompok creative minority untuk pembangunan NKRI ... menggerakkan sarana pendukung pembangunan dengan penuh semangat memerlukan kelompok creative minority.”(L. A. Nugroho et al., 2021, pp. 2419–2420)

Universitas Kristen Satya Wacana menjadikan *creative minority* sebagai visi perguruan tinggi dalam mendorong upaya pembangunan nasional; sosial, budaya, dan ekonomi. *Creative minority* ini berakar dari pemikiran Joseph Arnold Toynbee dalam karyanya “*A Study of History*”. Sebagai seorang sejarawan, Toynbee mengkaji lebih dari 20 peradaban dunia dalam bukunya. Baginya, peradaban akan mengalami masa perkembangan dan juga kemunduruan. Tantangan zaman yang dihadapi dengan cara yang benar akan melahirkan sebuah peradaban yang gemilang (Syam, 2018, p. 13). Peradaban yang gemilang, memiliki pra – syarat sebuah kebudayaan yang utuh dan kokoh. Tantangan inilah yang menjadi pekerjaan para *creative minority*. Mereka adalah sekelompok kecil orang yang berfikir, berdiskusi, dan mencari solusi atas persoalan zamannya. Lalu, mereka mampu menjadi pelopor dan penggerak mayoritas yang diam dalam membentuk kebudayaan yang berkeadaban untuk mencapai peradaban yang gemilang.

Dalam konteks ini, visi pendidikan *creative minority* menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam menerapkan pedagogi pendidikan yang lebih berorientasi pada perubahan sosial. Melalui pedagogi pendidikan yang ideal, maka dapatlah diwujudkan puncak – puncak kebudayaan sebagaimana yang diimpikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebab, puncak kebudayaan yang gemilang akan menentukan kejayaan sebuah peradaban. Oleh karena itu, studi kasus pendidikan intelektual berbasis *creative minority* di Sekolah Pemikiran Islam Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FAI UMY setidaknya mampu memberikan dua daya tawar: Pertama, untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pendidikannya di PK IMM FAI UMY; Kedua, untuk menjadi pertimbangan bagi lembaga pendidikan formal, khususnya Program Studi Pendidikan Agama Islam FAI UMY untuk menerapkan pedagogi pendidikan yang serupa (*creative minority*).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah dan proses pendidikan intelektual berbasis *creative minority* yang telah dilaksanakan di PK IMM FAI UMY?
2. Bagaimana peran *creative minority* dalam mengembangkan kapasitas intelektualitas mahasiswa?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat proses pendidikan intelektual berbasis *creative minority* di Sekolah Pemikiran Islam PK IMM FAI UMY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan sejarah dan proses pendidikan intelektual berbasis *creative minority* yang telah dilaksanakan di Sekolah Pemikiran Islam PK IMM FAI UMY
2. Mendeskripsikan peran *creative minority* dalam mengembangkan kapasitas intelektualitas mahasiswa
3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat proses pendidikan intelektual berbasis *creative minority* di Sekolah Pemikiran Islam PK IMM FAI UMY

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang akan dipetik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Sebagai informasi tambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang Pendidikan Intelektual di Indonesia
- b. Sebagai pengetahuan dan pengembangan pedagogi pendidikan yang lebih relevan dan berorientasi perubahan sosial
- c. Dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan dan dikembangkan oleh pihak yang berkepentingan

2. Secara kebijakan

- a. Bagi PK IMM FAI UMY, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dalam melaksanakan *creative minority* Sekolah Pemikiran Islam
- b. Bagi pemangku kebijakan dalam dunia pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan *banchmarking* untuk melaksanakan pendidikan yang substansial dan berorientasi jangka panjang

3. Secara praktis

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan dalam dunia kependidikan, khususnya pendidikan intelektual. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sudut pandang baru, perbandingan, dan rekomendasi baru dalam dunia kependidikan, khususnya pendidikan intelektual.

4. Secara isu dan aksi sosial

Penelitian ini memungkinkan untuk dijadikan rujukan gambaran bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ingin menempuh pendidikan intelektual sebagai agenda kaderisasinya berbasis *creative minority*. Kemudian, bisa juga diterapkan dalam pendidikan informal yang memiliki isu dan kebutuhan yang sama, dan tidak menutup kemungkinan juga dapat dijadikan sebagai gambaran dalam pelaksanaan pendidikan formal.

E. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pemahaman terhadap alur berfikir dan struktur penelitian ini. Maka disusunlah sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan. Bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat hasil, dan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.

Bab II tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini akan menguraikan penelitian-penelitian yang terdahulu untuk melihat konteks dan relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Gunanya adalah untuk memastikan adanya kebaruan dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Setelah itu, landasan teori untuk menguraikan konsep-konsep atau teori-teori yang dijadikan pisau analisis untuk penelitian yang sedang dibahas.

Bab III metode penelitian. Bab ini membahas terkait desain penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang dipakai, jenis penelitian, pengumpulan data, dan juga analisis data yang dilakukan.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini mendemonstrasikan hasil dari temuan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian kemudian dibahas menggunakan pisau analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan transparan.

Bab V penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan. Penutup menguraikan kesimpulan, implikasi yang didapatkan dari hasil penelitian, dan juga rekomendasi yang bisa diberikan kepada *stakeholders* terkait dari hasil penelitian.